

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Siklus anggaran dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan *APBN*. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya (contohnya tahun anggaran 2015) kepada *DPR* selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan (contohnya tahun 2014). Kemudian pemerintah pusat dan *DPR* membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan *APBN* tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama *DPR* membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam rangka penyusunan rancangan *APBN*, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (*RKA-KL*) tahun berikutnya. *RKA-KL* disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. *RKA-KL* tersebut disampaikan kepada *DPR* untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan *APBN*. Hasil pembahasan *RKA-KL* disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang *APBN* tahun berikutnya.

Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang *APBN*, disertai dengan nota keuangan dan dokumen–dokumen pendukungnya kepada *DPR* pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang *APBN* dilakukan sesuai dengan undang-undang yang

mengatur susunan dan kedudukan *DPR*. Dalam Pembahasan ini *DPR* dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang *APBN*

Ketika fase Pengendalian Manajemen masuk pada rana teknis pelaksanaan, maka menjadi penting kemudian untuk memahami dinamika dalam penganggaran. Penyusunan anggaran merupakan faktor penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Proses dari penyusunan anggaran yang terjadi sebelum tahun atau periode perusahaan berjalan.

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Kebutuhan *Good Corporate Governance* timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu entitas tersendiri yang terpisah merupakan subyek hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan *GCG*. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang harus disusun secara sistematis oleh instansi Pemerintah untuk mengukur capaian target dan realisasi anggaran yang dilaksanakan satu tahun berjalan,

LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Pentingnya *LAKIP* bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*), antara lain: media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja, *LAKIP* sebagai Instrumen Peningkatan kinerja berkesinambungan.

Terselenggaranya *Good Corporate Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada tap MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Selain pendekatan model *Agency Theory* dan *Stakeholders Theory* tersebut di atas, kajian permasalahan *GCG* oleh para akademisi dan praktisi juga berdasarkan *Stewardship Theory*, *Management Theory* dan lainnya. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan.

Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan

masalah-masalah yang terjadi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memiliki tiga peran penting yaitu pelaksanaan fungsi alokasi (berkaitan dengan alokasi faktor-faktor produksi), fungsi distribusi (berkaitan dengan masalah seperti pemerataan pendapatan), dan fungsi stabilitasi (berkaitan dengan stabilitas bidang ekonomi, moneter, politik, sosial, budaya, hankamnas, dan sebagainya), yang perlu didukung dengan mekanisme pengukuran kinerja yang baik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah untuk menciptakan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penciptaan pemerintah yang bebas dari KKN merupakan hal yang niscaya mengingat korupsi menekan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia selama ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan judul: **“Pengaruh Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada Pengaruh Penyusunan Perencanaan Anggaran terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta?
- b. Apakah ada Pengaruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta?
- c. Apakah ada Pengaruh Penyusunan Perencanaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Penyusunan Perencanaan Anggaran terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- b. Untuk menjelaskan Pengaruh penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan Output Kegiatan maupun Realisasi Anggaran di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- c. Untuk menjelaskan Pengaruh penyusunan Perencanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta

Sebagai tinjauan yang diharapkan memberikan manfaat untuk meningkatkan peran manajemen mulai dari *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*, dalam melakukan Penyusunan Perencanaan Anggaran dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) serta hasil yang dicapai baik itu pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Realisasi Anggaran sehingga Penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan optimal dan diterima oleh masyarakat pada umumnya dan *stakeholder* pada khususnya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan mengenai Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* dan mengaplikasikan materi dan pembelajaran yang dipelajari selama kuliah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna bagi pembaca sebagai sarana informasi tentang bagaimana Pengaruh Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta serta sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan tema yang sama yaitu Pengaruh Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*.

1.5 Batasan Penelitian

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementrian dalam upaya nya melakukan penerapan *Good Corporate Governance* di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi masalah pada tahapan Penyusunan Perencanaan Anggaran yang meliputi Kerangka Acuan Kerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga dan Rencana Anggaran Biaya dan Tahapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (*LAKIP*) yang dapat disajikan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

1.6 Model Operasional Penelitian

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, model operasional penelitian dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan,

Bab ini berisi hal-hal yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta model operasional penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka,

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, mencakup landasan teori dari variabel penelitian sebagai kerangka acuan dalam pembahasan masalah, *review* dari penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritikal, serta hipotesis yang akan diuji.

Bab 3 Metodologi Penelitian,

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, variabel-variabel penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang merupakan deskripsi model dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 4 Pembahasan,

Bab ini merupakan deskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data, serta *intepretasi* hasil analisis dikaitkan dengan dengan teori yang berlaku.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran,

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil analisis data yang telah diperoleh, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian serta saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil dari penelitian ini.